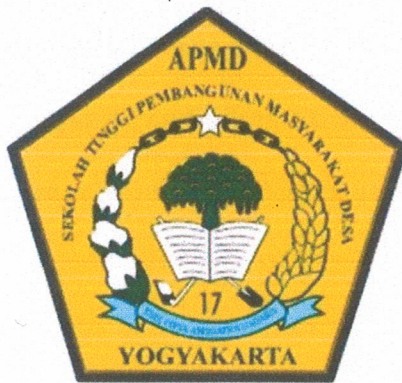


SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KALURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

**(Penelitian di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

FRENANDEMEZ REALINO KAMUSON
NIM: 20520122

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024



**PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KALURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

**(Penelitian di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

FRENANDEMEZ REALINO KAMUSON
NIM: 20520122

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2024
Waktu : 12:30 WIB
Tenpat : Ruang Sidang STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat
Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Supardal, M.Si
Penguji samping I

Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si
Penguji samping II

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

The stamp is circular with a purple border. Inside, it reads 'STPMD APMD YOGYAKARTA' at the top, 'PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN' in the middle, and 'YOGYAKARTA' at the bottom. There is a signature across the stamp.

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frenandemenz Realino Kamuson

Nim : 20520122

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KALURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA” adalah benar-benar hasil karya saya, dan saya telah memastikan bahwa semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah disebutkan dengan benar. Jika ada kesalahan, saya bersedia menerima konsekuensinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Penulis



Frenandemenz Realino Kamuson

20520122

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Frenandemenz Realino Kamuson
NIM : 20520122
Telp : 081236814337
Email : frenandemenzdemenz@gmail.com
Program Studi : Ilmu pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan masyarakat desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada program studi ilmu pemerintahan strata satu sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah saya yang berjudul:

“(Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Kalurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa)”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **hak bebas royalti non-Eksklusif (*non-eksklusif royalty-free ritgh*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya :

Yogyakarta.

Yang membuat pernyataan



Frenandemenz realino kamuson
20520122

MOTTO

Yakobus 1:12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, karena apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan ALLAH kepada barang siapa yang mengasihi dia."

Mazmur 37:5 mengatakan, "Serahkanlah hidupmu pada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Dia akan bertindak."

"Selalu ada jalan keluar untuk kemenangan, tidak peduli seberapa sulit tantangan yang dihadapi."

"Jangan pernah menyerah terlepas dari apa yang terjadi."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraaNya dalam menyelesaikan skripsi ini . Maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapa dan Mama tercinta . Bapa Bernadus Kamuson dan Mama Maria Yasinta Tiha . terimakasih yang tak terhingga sudah membesarkan , mendidik dan menemani penulisan dari titik nol hidup ini . terimakasih telah menjadi “ rumah” ternyaman untuk pulang dan melepaskan segala keluh kesa dan beban berat . bapa dan mama adalah alasan bagi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini . semoga bapa dan mama umur panjang dan sehat selalu .
2. Untuk kakak-kakak yang tercinta dan keluarga terbaik , kakak eka kamuson , kakak pascal , opa mikael kaus dan oma elisabet limut, opa sius syukur dan oma mina , om karol , om finus ,om bone ,tanta erli ,tanta tini ,tanta icah , kakak wiliam , kakak tarsi ,mega ,erika . Terimakasih banyak sudah ada disaat saya membutuhkan bantuan . terimakasih karena mendukung saya lewat doa dalam kelancaran study saya . semoga kalian sehat selalu dan diberkati semua usaha dan pekerjaan.
3. Untuk teman-teman seperjuangan Steni, Agustinus Holo, Risno,Rehan, Maya, Dedit, Tiwi, Taufq , Abri anak kos kontrakan flores janti . terimakasih untuk kebersamaan dan suport kepada penulis dan semangat untuk perjuangan kedepanya .
4. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu . terimakasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini . terimakasih atas dukungan, masukan, ide-ide dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini .

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan karunia Tuhan yang berujung pada penyusunan karya berjudul “Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Kalurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari segala kekurangannya oleh karena itu sangat berterima kasih atas masukan dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan bahan untuk perbaikan karya ini lebih lanjut.

Tentu saja, pekerjaan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan langsung dan tidak langsung dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

1. Almamater Perguruan Tinggi Pengembangan Masyarakat Kalurahan “APMD” di Yogyakarta sebagai tempat menulis untuk menimba ilmu dan ilmu akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si diangkat menjadi ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sadan ditunjuk sebagai ketua program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Kepada Bapak Dr. Tri Nugroho yang telah dengan sabar memberikan saya pemikiran, ilmu, dan gagasan yang mendukung terciptanya karya ini.

5. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Kerabat STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang akan sangat berguna untuk penulisan skripsi ini.
6. Bapak Heryono ST, Kepala Kalurahan Kalurahan Widodomartani, dan seluruh perangkat Kalurahan Widodomartani yang memberikan izin penelitian, memfasilitasi penelitian dan membantu penulis menyelesaikan tulisan di Kalurahan Widodomartani, dan seluruh masyarakat Widodomartani.

Penulis memahami bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna karena cara penulisan. Penulis selalu terbuka dan menghargai saran dan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Penulis



Frenandemenz Realino Kamuson

20520122

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Fokus Penelitian.....	18
D. Tujuan penelitian	18
E. Manfaat penelitian	19
F. Literatur Review	19
G. Kerangka Konsenptual.....	27
1. Pembangunan Infrastruktur Desa.....	27
2. Peran pemerintah desa	28
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	30
4. Kesejahteraan masyarakat desa	31
H. Ruang Lingkup.....	32
I. Metode penelitian.....	33
1. Jenis penelitian.....	33
2. Unit Analisis	34
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36

4. Analisis data.....	38
BAB II PROFIL KALURAHAN WIDODOMARTANI	40
A. Sejarah Kalurahan Widodomartani.....	40
B. Keadaan Geografis.....	42
C. Keadaan Demografis.....	44
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	48
E. Struktur organisasi kalurahan widodomartani	49
BAB III ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI	
MASYARAKAT KALURAHAN DALAM PEMBANGUNAN	
INFRASTRUKTUR GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN	
MASYARAKAT DESA	54
A. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur.....	56
B. Partisipasi Masyarakat Kalurahan.....	64
C. Kesejahteraan Masyarakat Desa	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Wawancara Informan Subjek Penelitian.....	9
Tabel 2. 1 Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kalurahan Widodomartani .	43
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Umur	45
Tabel 2. 3 Tabel Penduduk Berdasarkan Agama	45
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	46
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	47
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	48
Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	48
Tabel 2. 8 Sarana dan Prasana Kesehatan	49
Tabel 2. 9 Tabel Jabatan dan Tugas Pemerinah Kalurahan Widodomartani	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta wilayah Kalurahan Widodomartani	43
Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman	52

INTISARI

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintahan dan partisipasi masyarakat kalurahan dalam pembangunan infrastruktur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana pemerintah Kalurahan merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di tingkat Kalurahan yang meliputi jalan, jembatan, penyediaan air bersih, listrik, serta fasilitas lainnya yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kalurahan dalam melaksanakan pembangunan tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat kalurahan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta studi dokumentasi terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di kalurahan. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk mengamati proses pembangunan infrastruktur di lapangan. Penelitian ini berfokus pada analisis peran pemerintah kalurahan dalam setiap tahapan pembangunan, serta kendala yang dihadapi dalam mengelola dan mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan kalurahan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur. pemerintah kalurahan berhasil memanfaatkan dana kalurahan secara optimal, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Masyarakat berperan aktif dalam setiap tahap pembangunan, yang turut mendukung keberhasilan proyek-proyek infrastruktur. Meskipun demikian, dengan adanya perbaikan kapasitas aparatur Kalurahan dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemakmuran rakyat di Kalurahan tersebut.

Kata Kunci : Peran pemerintah, Pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawa harapan baru kepada pemerintah dan masyarakat desa. dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa secara tidak langsung mendorong pemerintah desa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pembangunan desa di Indonesia, bertujuan untuk mengubah desa mandiri (tradisional) dari desa swadaya (peralihan) menjadi desa mandiri (tradisional) guna meningkatkan pendapatan per kapita dengan mengaktifkan kegiatan sosial ekonomi dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan. Sedang dilakukan metode peningkatan ke desa maju akan meningkat. Hal ini diupayakan dengan mengkaji proses perencanaan penyediaan infrastruktur desa dengan ruang yang diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan sumber daya alam dan manusia dalam jumlah besar. Perencanaan merupakan masalah yang serius, terutama di desa-desa yang sumber dayanya terbatas. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa , pendanaan desa telah mengubah paradigma pembangunan partisipatif dan jumlahnya semakin meningkat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang sangat penting bagi

pemerintah desa setiap tahunnya. Dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur kota, maka pemerintah desa akan berperan penting dalam membangun peningkatan kualitas perekonomian desa di masa depan, dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

Sebagai bagian dari pembangunan kalurahan yang komprehensif, terpadu dan terencana, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak hanya bergantung pada dukungan berjalannya pemerintahan kalurahan, namun juga pada partisipasi dan pengorganisasian yang jelas dari masyarakat kalurahan yang terkena dampak. Efektivitas pembangunan merupakan ukuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengingat efektivitas pembangunan, maka dukungan dan bantuan pemerintah terhadap pembangunan kalurahan itu sendiri sangatlah penting. Pada hakikatnya pembangunan adalah suatu tindakan perbaikan terencana dari suatu keadaan ke keadaan lain yang dianggap lebih baik. Syaukani (2004) menjelaskan bahwa efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran bagi tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembangunan kalurahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan mempunyai dampak yang paling besar terhadap kehidupan masyarakat kalurahan. Pembangunan suatu Kalurahan harus diawali dengan perbaikan fasilitas yang berjalan. Untuk mencapai pembangunan Kalurahan yang merupakan bagian terpenting dari pembangunan bagi pemerintah, maka pelaksanaannya dipercayakan kepada kepala kalurahan /penguasa kalurahan yang bertindak sebagai

koordinator dan pengelola pemerintahan kalurahan. Lebih lanjut, penguatan pembangunan kalurahan memerlukan kemampuan kepala kalurahan untuk berkolaborasi dengan perangkat kalurahan dan masyarakat melalui kelembagaan kalurahan .

Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Dalam hal ini lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi mitra kerjasama pemerintah kalurahan dalam bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan aktif untuk melaksanakan pembangunan terpadu yang terdiri dari berbagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan swadaya. Gotong royong masyarakat menciptakan kerjasama yang kolaboratif dan kondisi yang dinamis agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Proses pembangunan saat ini berakar dari bawah (from the grass root) dan harus memahami serta menghormati prinsip-prinsip pembangunan yang menjaga keberagaman budaya serta menjunjung tinggi martabat dan kebebasan manusia. Pembangunan berkelanjutan harus mencakup proses pemberdayaan masyarakat yang menciptakan dampak pembangunan yang dinamis untuk mencapai tujuan. Konsep yang sering muncul dalam proses pemberdayaan adalah konsep ``kemandirian," dimana program pembangunan dirancang secara sistematis untuk menjadikan individu dan masyarakat sebagai agen pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan kalurahan di masa lalu antara lain disebabkan oleh persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal.

Proses pembangunan mendukung paradigma politik yang terpusat dan peran negara yang dominan dalam arus utama kehidupan bermasyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah program pembangunan infrastruktur perdesaan . Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mencanangkan program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di desa melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Dahlan, dkk., 2012:44).

Effendy (2002:48) mengembangkan infrastruktur yang memadai berupa bimbingan pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, ketersediaan fasilitas pelayanan publik antara lain listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, dan teknologi penting untuk melakukannya. Tujuan komunikasi adalah untuk mendorong kegiatan perekonomian dengan memungkinkan masyarakat bergerak lebih dinamis, dan membuat investor mau menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Jika tidak, biaya investasi modal akan tinggi sehingga mempengaruhi harga. Tentu saja produk yang dihasilkan tidak berdaya saing karena harganya yang mahal dibandingkan dengan produk lain (Rosalina, 2013:110).

Pemerintah daerah mengakui kewenangan tersebut kalurahan dan kepala kalurahan dapat menerima kontrak atau delegasi dari pemerintah

pusat atau daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu. Saat ini kalurahan dianggap sebagai basis pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, bersifat bottom-up, dan segala rencana dan pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada aspirasi masyarakat. Komunitas kalurahan tercakup dalam semua program pemberdayaan masyarakat di negara. Tujuannya adalah untuk memberikan masyarakat kalurahan kemandirian dan kekuatan untuk mengurus diri mereka sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai perantara motivasi, hal yang mendorong terjadinya hal ini adalah pengalaman bahwa sebagian masyarakat kalurahan masih hidup tidak berdaya di bawah garis kemiskinan dan diperlukan dukungan dini untuk mengubah situasi ini.

Dalam kerangka otonomi luas, daerah akan mengembangkan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keberagaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik diharapkan dapat meningkatkan jumlah tersebut. Indonesia secara resmi mengeluarkan peraturan pemerintah tentang desa sebagai landasan hukum untuk mengatur segala sesuatu yang dianggap bagian dari desa. Kalurahan juga merupakan bentuk pemerintahan administratif terkecil, Desentralisasi ini tidak terbatas pada tingkat kota saja, namun juga berlaku pada kalurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus batas wilayah dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Sesuai kewajiban Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan sarana dan prasarana desa, serta bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengembangkan potensi perekonomian daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah memberikan subsidi yang relatif besar yang dikenal dengan dana desa. Dana desa merupakan salah satu program nasional, pembangunan daerah tertinggal dan migrasi sejak tahun 2015 hingga saat ini. Setiap tahunnya, pemerintah pusat memberikan dana desa yang cukup besar kepada setiap desa di Indonesia. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa APBDes mempunyai tiga sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa (PAD), dan pendapatan lain-lain. Dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan keuangan pemerintah pusat kepada desa dan tergolong dalam transfer pendapatan. Sebelum adanya dukungan dana desa (DD), desa di Indonesia memperoleh pendapatan lain yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan dana desa (DD), yaitu alokasi dana desa (ADD). Penyaluran dana desa (ADD) juga merupakan salah satu pendapatan desa yang termasuk dalam kelompok pendapatan transfer. Perbedaan mendasar antara dana desa (DD) dan Alokasi dana (ADD) terletak pada sumbernya. Prioritas penggunaan dana desa akan ditentukan sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Dana desa ini bertujuan agar setiap desa dapat

mengembangkan perekonomian masyarakatnya melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, serta pengembangan daya tarik wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintahan kalurahan Widodomartani Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, untuk mewujudkan pemerintahan kalurahan yang unggul, maka harus dilaksanakan visi dan misi tersebut dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagaimana tertuang dalam visi dan misi serta tertuang dalam RPJMKal, sebagai salah satu strategi pelaksanaan program, pemerintah kalurahan widodomartani akan menetapkan strategi pembangunan dengan menggunakan pembangunan partisipatif, strategi ini dapat melibatkan elemen masyarakat dalam perencanaan proses pembangunan,implementasi, dan evaluasi. Dalam pembangunan partisipatif, pembangunan yang dilakukan selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat juga dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi.

Di antara kegiatan prioritas yang direncanakan setiap tahun, penekanan akan ditempatkan pada pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan ganda dibidang pendidikan, kesehatan/lingkungan, infrastruktur, politik, kemasyarakatan, budaya, agama, ekonomi, dan jaminan sosial di kalurahan widodomartani. Sumber pendanaan dari

pemerintah pusat, tokoh masyarakat dan kepala kalurahan, dana desa ADD, PAD, swadaya masyarakat, dan dukungan tidak mengikat dari pihak lain. Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai secara bertahap dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan untuk memperoleh anggaran yang dapat diakses oleh kalurahan . Kegiatan pembiayaan berskala besar, seperti sarana dan prasarana dasar, memerlukan pendanaan dari pemerintah pusat seperti dana desa dan ADD, serta dukungan dari pemerintah daerah. Namun pendanaan untuk operasional skala kecil berasal dari PAD dan swadaya masyarakat.

Pelaksanaan dan koordinasi setiap kegiatan akan sedapat mungkin disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat terutama penerima manfaat dan kelompok sasaran. Kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama, budaya, amal dan pelayanan sosial dikelola oleh lembaga masyarakat kabupaten, pemerintah kabupaten dan kota , serta kebijakan pembangunan kalurahan widodomartani.

Kalurahan widodomartani merupakan salah satu kalurahan di kapanewong ngemplak, kabupaten sleman, daerah Istimewa yogyakarta. Pembangunan infrastruktur di kalurahan widodomartani memiliki akses terhadap infrastruktur yang terbatas, misalnya kalurahan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Di sini peran pemerintah kalurahan menjadi sangat

penting karena peranannya dalam mengoptimalkan pembangunan sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, menetapkan peraturan, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Proyek pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat secara adil. Melalui peran ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat secara keseluruhan dan lingkungan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai pembangunan kalurahan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (studi di kalurahan widodomartani, kapanewon ngemplak , kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta).

Tabel 1. 1 Tabel Wawancara Informan Subjek Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan/ pekerjaan	Wawancara	Kesimpulan
1	Heruyono	47 tahun	Sarjana Tenik	Lurah	Jadi begini <i>mas</i> untuk pembangunan infrastruktur kalurahan ,kami sebagai pemerintah kalurahan sudah berupaya baik dalam membangun infrastruk .dimana kami melakukan uapaya pembangunan yang sudah di rencanakan sebelumnya melalui MUSDES kemudian kita mengidentifikasi permintaan yang	dari pihak kalurahan telah berupaya melakukan interaksi dengan warga masyarakat dengan cara musdes termasuk memberikan kesempatan bagi warga dalam menentukan apa saja pembangunan yang selaknya dibangun dan menjadi prioritas pembangunan

					sekiranya menjadi urjenitas, jadi kita pilih yang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk kedepanya	infrastruktur kalurahan sehingga pemerintah kalurahan menetapkan pembangunan yang sudah disepakati
2	Kismadi	45 tahun	Sma sederajat	Dukuh	Dari pemerintah kalurahan sendiri telah memfasilitasi dengan dana desa. adapun sebagian pembangunan fasilitas itu seperti gapura irigasi dan beberapa jalan menuju lahan pertanian	Dari kalurahan sendiri telah memfasilitasi dana kebutuhan unruk melakukan pembangunan yang dibutuhkan oleh warga dari yang telah diusalkan oleh warga terkait pembangunan yang harus dibangun
3	Kalpika ningsih	40 tahun	Sma sederajat	Ketua BPKal widododmartani	Kita sudah melaksanakan dan mengkordinator masing-maing kegiatan yang akan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada , namun kami melibatkan masyarakat kalurahan untuk bersama sama menentukan sasaran pembangunan yang diperlukam	Dari BPKal widodomartani telah melaksanakan kordinator di masing-masing lembaga . dimana kemudian akan dituangkan di di BPKal widodomartani keterlibatan warga masyarakat tentunya hal penting dimana warga diberi kesempatan untuk menentukan pembangunan infrastruktur yang mereka butuhkan
4	Taufiq wahyu	49 tahun	Sarjana hukum	Carik	Jadi biasanya kami melakukan penjaringan aspirasi di tingkat	Musyawahar dikalurahan widodomartani dilakukan

	widodo				padukuhan mengenai pembangunan nanti kemudian usulan dari padukuhan kemudian akan di bawah ke tingkat kalurahan	secara berjenjang mulai dari tingkat padukuhan hingga tingkat kalurahan agar usulan mengenai pembangunan infrastruktur dapat diketahui oleh semua warga kalurahan
5	Suharsono	58 tahun	Sma sederajat	Tokoh masyarakat	dari kami sendiri mendukung terkait apa yang seharusnya dibangun intinya pembangunan itu bisa bermanfaat bagi warga kalurahan .melihat peran pemerintah kalurahan sudah cukup baik	Pemerintah kalurahan telah melakukan kegiatan atau program – program yang telah diinginkan oleh warga kalurahan dengan baik dan didukung oleh warga masyarakat kalurahan . karna pemerintah kalurahan telah melakukan consensus (kesepahaman)
6	Irvan adnan	43 tahun	Sma sederajat	Sekretaris BPKal widodomartani	Oh iya mas di padukuhan sudah melakukan musyawarah terkait prioritas apa saja yang nanti dibangu.. jadi kemudian akan di rembuk bersama pemerintah kalurahan terkait pembagunan yang bersifat merata bagi seluruh masyarakat	Untuk memperoleh pembangunan yang optimal pemerintah kalurahan harus mampu melaksanakan pekerjaan yang sama dan dapat menyingkronkan dari hasil kerja masing-masing .agar dapat memperoleh kinerja yang bagus terkait pembangunan infrastruktur

						kalurahan
7	Muhamad yusuf	53 tahun	Sma sederajat	Warga	Yang saya lihat mas untuk fasilitas yang dibangun sudah ada yang di usulkan oleh warga . tapi itu di padukuhan yang sudah dibangun namun di padukuhan lain belum dilaksanakan pembangunan	Sementara itu terkait pembangunan masih ada warga yang merasa belum puas dengan kinerja yang pemerintah kalurahan , dimana ternyata ada sebagian pembangunan yang belum dibuat dan masih menjadi pertanyaan buat warga yang merasa kurang peruntukan
8	Nugroho	51 tahun	Sma sederajat	Warga	Ya memang ,kami selalu diundang dan terlibat memberikan usulan untuk pembangunan yang kami minta . tapi usulan yang kami minta itu masih di pertimbangkan oleh meraka mas .	Keterlibatan warga terkait usulan pembangunan kalurahan yang ada tetapi sebagian usulan meraka masih belum di terima oleh pemerintah kalurahan mungkin dikarnakan terkait pembanguan tersebut terlalu memakan biaya yang cukup besar
9	Anton	47 tahun	Sma sederajat	Warga	Ada program pemerintah yang membantu desa kami dalam hal infrastruktur, seperti jalan yang baik dan adanya bantuan langsung tunai. Namun, masalah utama kami ada dibidang pekerjaan dan	Dengan adanya bantuan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur dan bantuan langsung tunai dapat meringankan mereka namun itu tidak menjadi pokok

					pendapatan warga	sumber penghasilan mereka, dimana mereka menginginkan pekerjaan yang tetap agar pendapatan pokok ada .
10	Ahmad	45 tahun	Sma sederajat	Warga	Saya rasa kinerja pemerintah kalurahan memang masih banyak yang perlu di perbaik mas . terkait pengurusan administrasi untuk pelayanan warga ,masih banyak warga yang mengeluh soal itu	Sementara itu warga masih mengeluh dengan pelayanan pemerintah kalurahan yang belum cepat terkait pelayanan admistrasi
11	Samsul	37 tahun	Sma sederajat	Warga	Kalo dari saya sih mas namanya kita membangun sebuah desa itu tidak mudah ,pasti banyak hambatan atau masalah yang dihadapi oleh kita .karna banyak warga mungkin masih mengeluh dengan kinerja pemerintah desanya , ya karna kita tau mungkin ada rivalitas antar warga dengan pemerintah kalurahan .	Adapun warga yang merasa semua urusan tentang pembangunan memang sulit dijalankan dengan baik , karna mengurus itu semua bukan hal mudah , tetapi mereka mengharapkan agar kinerja pemerintahan bisa lebih baik dan merata untuk seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh warga
12	Tini	40 tahun	Sma sederajat	Warga	kalo saya lihat di bidang kesehatan aksesnya sudah cukup baik karena adanya puskesmas yang selalu siap melayani . Tapi kadang-kadang, obat nya atau alat medisnya terbatas .kalo untuk	Terkait aksen pelayanan kesehatan di kalurahan widodomartani memang sudah ada seperti puskesmas namun terbatas nya oabatan yang

					pendidikan , saya rasa sudah cukup memadai,	dibutuhkan warga masih ada , untuk pendidikan dikalurahan widodomartani sudah cukup baik
13	Heruyono	47 tahun	Sarjana teknik	Lurah	Jadi begini secara umum, masyarakat di kalurahan kami cukup berkembang meski masih banyak tantangan. Sebagian besar warganya bekerja di sektor pertanian sebagaimana pendapatan utama mereka sendiri yaitu dari hasil pertanian, tetapi ada juga yang membuka usaha kecil dan menengah (UKM).	untuk menunjang kesejahteraan warga masyarakat pemerintah kalurahan membuat beberapa program yang bisa membantu warga masyarakat. Dimana program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (PKH) serta program untuk pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan

(Raminim Saragih, Sarwititi Agung, 2017) sebesar Rp 20.766. \$1 triliun telah dikeluarkan yang akan disediakan untuk pembangunan kalurahan prioritas dan pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). aspek pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan ini. Masyarakat diharapkan turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sehingga penggunaan dana kalurahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk

membangun masyarakat indonesia dari kalurahan hingga masyarakat mandiri. Ada banyak kekhawatiran, seperti apakah pemanfaatan dana kalurahan benar-benar dapat memperkuat masyarakat dan melibatkan masyarakat kalurahan secara partisipatif. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa prioritas pemanfaatan program dan penggunaan dana kalurahan masih belum jelas, karena penyusunan RPJM kalurahan -RKP kalurahan belum selaras dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Peran penyuluh dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kurang optimal karena pengetahuan aparat kalurahan yang minim. Akibatnya pembangunan kurang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dari awal hingga akhir program, serta rencana yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Artikel ini menjelaskan bagaimana peran partisipatif dalam program pemanfaatan sumber daya kalurahan dapat digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau penilaian penggunaan sumber daya kalurahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam pembangunan kalurahan tentunya peran penting pemerintahan kalurahan sangat dibutuhkan dalam segala aspek pembangunan seperti infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia , pendidikan serta fasilitas kebutuhan lain bagi masyarakat, sehingga tingkat pembangunan kalurahan jelas diperuntukan bagi warga masyarakat kalurahan itu sendiri. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menilai

bagaimana pemerintah kalurahan bekerja secara baik dengan melihat hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat dilihat dari aspek pembangunan tersebut

Tujuan penting dalam pembangunan kalurahan itu sendiri adalah upaya mensukseskan pembangunan kalurahan. Secara umum, kita menghadapi banyak tantangan saat ini yang sangat berbeda dengan masa lalu. Tantangan pertama terkait dengan kondisi eksternal, seperti situasi internasional terkait arus investasi dan liberalisasi perdagangan global. kedua, bersifat domestik dan berkaitan dengan perubahan kondisi makro dan mikro di dalam negeri. Tantangan dalam negeri meliputi perubahan struktur perekonomian, permasalahan migrasi spasial dan sektoral, ketahanan pangan, permasalahan ketersediaan lahan pertanian, permasalahan investasi dan permodalan, permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan sumber daya manusia, dan lingkungan hidup.

Pemerintah kalurahan yang menggarap pembangunan infrastruktur di kalurahan widodomartani mengatakan, perbaikan infrastruktur pemerintah kalurahan dalam rencana pembangunan kalurahan widodomartani tahun 2018 meliputi saluran irigasi, coran, gorong-gorong dan perumahan yang tidak memadai. Kesenjangan antar kalurahan dan batas kalurahan, pengerasan jalan, pengerasan aspal, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Dalam pembangunan infrastruktur kalurahan widodomartani masyarakat dilibatkan melalui musdes. Kemudian musdes usulan-usulan masyarakat masuk ke dalamnya. Setelah musyawarah kalurahan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah kalurahan yang secara otomatis melibatkan masyarakat. Musdes ini merupakan usulan dari

bawah yang melibatkan seluruh masyarakat, RT. Faktor pemimpin partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah kalurahan dalam proses dalam pembangunan infrastruktur di kalurahan widodomartani masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan warga masyarakat kalurahan adalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kalurahan widodomartani pembangunanya tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan, warga yang majemuk, sangat banyak, dan dapat dikatakan semua warga menginginkannya wilayahnya dibangun. kendala lainnya yaitu peran pemerintahan kalurahan dalam memberikan pengertian kepada warga yang sangat sulit, masyarakat tidak mengetahui prosedurnya atau masih awam. Kemudian ada juga kendala alam di kalurahan widodomartani dan sekitarnya yang kadang-kadang tidak menentu. Sedangkan kendala yang berada di luar daerah yang jauh dari penduduk yang tidak mau kerja bakti (tidak mau berpartisipasi), misalnya kerja bakti jalan, tetapi di tengah sawah, aspek kesiapan material bangunan atau akses materialnya juga menjadi kendala, selain kendala pada masalah anggaran di atas (turunnya dana sudah mendekati akhir tahun).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana peran pemerintah kalurahan widodomartani dalam pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat kalurahan dalam membantu pemerintah kalurahan?

C. Fokus Penelitian

1. Peran pemerintah kalurahan widodomartani dalam pembangunan infrastruktur
2. Partisipasi masyarakat kalurahan dalam pembangunan infratsruktur
3. Kesejahtraan masyarakat desa

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah kalurahan dalam pembangunan infrastruktur guna mewujudkan kesejahtraan masyarakat di kalurahan widodomartani kecamatan ngemplak, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat kalurahan widodomartani dalam membantu pemerintah kalurahan widodomartani , kecamatan ngemplak, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan widodomartani , kapanewon ngemplak ,kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintahan kalurahan widodomartani hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan informasi dalam proses membangun infrastruktur kalurahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat kalurahan widodomartani
2. Bagi masyarakat kalurahan, diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi agar partisipasi peran serta dalam membantu pemerintahan kalurahan widodomartani dalam membangun infrastruktur kalurahan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat kalurahan widodomartani.
3. Bagi pembaca agar hasil penelitian ini berharap agar pengetahuan semakin luas terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kalurahan.

F. Literatur Review

Pertama (*Fitrianti et al., 2022*) Jurnal of Regional and Rural Development Planning Dalam Jurnal, Volume 6, Tahun 2022. Yang berjudul “Pembangunan Insfrastruktur di Kalurahan” dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review yaitu mengkaji dan membaca kembali pokok-pokok pikiran tentang topik yang sama dan kemudian menambahkan argumen serta pandangan atau pendapat penulis mengenai subjek yang akan diangkat. Adapun tujuan penelitian ini untuk

mengungkapkan bahwa dalam perencanaan pembangunan perKalurahan an pada saat ini perlu adanya sebuah perencanaan yang efektif, transparan, akuntabel dan punya master plan yang bagus.bagus

Kedua (*Menurut Siagian (2009:142-150)*, Judul “Peran Pemerintah Kalurahan. Dalam Pembangunan Infrastruktur ” Dalam hal ini, pimpinan daerah dan organisasinya mempunyai tiga keunggulan utama. Stabilitas merupakan upaya kepala provinsi membangun stabilitas di bidang konstruksi. Sebagaimana kita ketahui, proyek-proyek pembangunan mempunyai hambatan dan relasi kekuasaan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan (Amantha 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, ayat 1 disebutkan pada ayat 2 bahwa pemerintahan desa mengakomodasi kemauan pemerintah dan kepentingan penduduk setempat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia I pagi. . Selain itu, pada alinea ketiga, pemerintah carlahan mendukung carlahan sebagai pemerintahan Carlahan yang tiada tara, baik itu kepala Carlahan atau nama lainnya. Sebagaimana dikemukakan Widjaja (2004:20). Pemerintahan kecamatan adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat beserta lembaganya dan badan perwakilan kecamatan (BPD), sedangkan pemerintah kecamatan adalah camat beserta lembaganya (Rahum 2015).

Ketiga (*Menurut Adisasmita (2006)*, Judul “ Strategi Pembangunan Kalurahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Melalui Badan Usaha Milik Kalurahan ” Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi yang berisi

indikasi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan peKalurahan an dipandang sebagai upaya mempercepat pembangunan peKalurahan an melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis strategi pembangunan Kalurahan dalam meningkatkan pendapatan asli Kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes) pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM)

Kempat (*Amantha, Goestyari Kurnia. 2021*) “Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Desa Wei ulan merupakan salah satu desa di kecamatan padang cermin kabupaten Pesawaran yang mempunyai potensi sumber air panas alami. Belum mungkin dikembangkan dan dikelola secara optimal potensi kekayaan alam untuk mencapai manfaat maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait pengelolaan sumber air panas di distrik wei wulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dianalisis untuk reduksi data, penyajian data, dan validasi data. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Wei Ulan di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran belum mampu menjalankan perannya sebagai stabilisator, inovator, pionir dan modernisasi dalam pengelolaan sumber air panas Desa Wei Ulan. Hal

ini berbanding lurus dengan keadaan kesejahteraan sosial, dimana kebebasan penuh suatu masyarakat ditingkatkan melalui peningkatan standar hidup, peningkatan penentuan nasib sendiri, dan perluasan pilihan serta akses terhadap peluang yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar kemanusiaan kesejahteraan tidak tepat. Masih tersedia. Hal ini disebabkan belum adanya sinergitas antara masyarakat, Pemerintah Kalurahan dan pemerintah daerah setempat dalam pengembangan, pengelolaan dan pembenahan sumber air panas Way Kalurahan.

Kelima (*Arsyad, Lincoln dkk. 2011*) “Strategi Pembangunan Kalurahan Berbasis Lokal”. Secara geografis, wilayah pedesaan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Tentunya kecamatan-kecamatan di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti status infrastruktur sosial, budaya dan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan tingkat kemajuan pembangunan yang dicapai. Hal ini berdampak pada perkembangan wilayah kabupaten tersebut. Pertama, perlunya penataan kembali bidang pembangunan berdasarkan kesamaan karakteristik dasar yang ada, guna menjamin perumusan strategi, penetapan skala prioritas, dan penetapan program pembangunan lebih mudah dan efisien. Yang kedua adalah memilih model pendekatan yang efektif untuk pembangunan daerah berdasarkan kekayaan sumber daya daerah dan kearifan lokal.

Keenam (*Katili, Andi Yusuf, 2020*), Judul “Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Kalurahan(Gerbang Kalurahan) Melalui Program Infrastruktur”. Tujuan penelitian ini adalah

untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan gerakan pembangunan desa melalui perencanaan infrastruktur di desa Bulal, kecamatan Kwandan, provinsi Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan dalam jumlah yang telah ditentukan, yaitu informan yang memiliki keterampilan terkait penelitian.

Kajian tersebut menyimpulkan bahwa rencana aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten belum dilaksanakan secara maksimal karena tidak mengikutsertakan masyarakat miskin dalam menentukan skala prioritas usulan yang akan dilaksanakan. Sumber daya manusia (SDM) dan keahlian tim pelaksana aksi desa (TPKD) belum memenuhi syarat untuk menjadi pelaksana aksi desa. Tidak ada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) atau tenaga kerja lokal oleh pemerintah kecamatan dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan.

Ketujuh (*Posumah, Ferdy. 2015.*) "Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien* 15 (2): 1–13. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu daerah berkembang di Sulawesi Utara dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang relatif tinggi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Tingginya tingkat ekspansi infrastruktur juga secara tidak langsung meningkatkan investasi. Hal ini mendorong

pemerintah untuk meningkatkan jumlah pembangunan infrastruktur di wilayah Minahasa Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pembangunan infrastruktur sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2011 hingga 2013. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari organisasi terkait. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor kesehatan dan pendidikan tidak mempengaruhi investasi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur di sektor pertanian berdampak pada investasi.

Kedelapan (Sasmito, Cahyo. 2017.) “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Kalurahan .” Pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana paling mendasar dalam menunjang kelancaran logistik dan jaringan transportasi manusia. Kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari kondisi fisik kawasan dan fasilitas yang disediakan pemerintah. Metodologi penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, jenis data, dan sumber yang meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel yang ditargetkan. Efektivitas dan penggunaan teknik triangulasi. Analisis dengan cara reduksi, representasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Seberapa sukses pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Kalurahan di Kecamatan

Torontoraja dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. 2) Faktor penghambat atau pendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Calahan yaitu terbatasnya akses lokasi dan rendahnya sumber daya sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak optimal. Unsur pendukung antara lain kebebasan ikut serta dalam pelaksanaan Callahan dan dukungan penyaluran dana pembangunan infrastruktur jalan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dapat terlaksana dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Kesembilan (*Jurnal Manejemen Dan Kebijakan Public, Gema publica* ,Vol.3,Hal,85-91,Desember 2018) Judul “ Kebijakan Pembangunan Kalurahan Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Di Kalurahan Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai salah satu kebijakan pembangunan menimbulkan implikasi dalam sistem penganggaran yaitu munculnya adna desa (DD) dan Alokasi Dana desa (ADD) dalam komponen anggaran epndapatan dan Belanja desa (APBDes). Salah satu tujuan Undang-Undang desa melalui ADD dan alokasi dana desa adalah untuk memastikan infrastruktur dasar seperti jalan, kanal, tanggul, listrik dan air bersih di desa telah terpenuhi sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan ekonomi desa. Jalan yang merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berkaitan dengan transportasi dan aksesibilitas merupakan kunci dalam perekonomian suatu daerah. Adanya jalan yang baik memudahkan akses menuju suatu daerah

dan masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini tentunya akan memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan masyarakat salah satunya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang salah satunya dapat dilihat dengan adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal yang penting untuk dikaji lebih dalam adalah bagaimana ketersediaan fasilitas jalan yang baik di Kalurahan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB.

Kesepuluh (*Pratama & Setiawan, 2022*) Jurnal Administrasi Publik, Volume 8, Tahun 2022. Penelitian ini berjudul "Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam menggerakkan pembangunan insfrastruktur Kalurahan Makunjung, Kapanewon Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah ". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan insfrastrukt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Dari hasil pembahasan diketahui dimana pemerataan insfrastruktur pembangunan tidak didapatkan secara merata bagi masyarakat Kalurahan makunjung itu sendiri hal itu di tandai dengan kurangnya penyerapan aspirasi dari pemerintah Kalurahan makunjung dengan masyarakat Kalurahan dalam melakukan pembangunan insfrastruktur serta kurang relasi yang baik terhadap pemerintah Kalurahan , masyarakat, dan swasta. Peran seorang pemerintah itu sangat penting bagi masyarakat Kalurahan dalam membuat keputusan, kebijakan, moderator, fasilitator dan sebagai pemimpin yang berpihak terhadap masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian oeneliti sebagai sumber refrensi bagi peneliti dalam penelitian ini. Terdapat sepulu penelitia terdahulu. Adapun persamaaan falam penelitian ini yaitu sama sama menjelaskan bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam mengoptimalakn pembangunan infastruktur. Akan tetapi adapun perbedaanya terletak pada metode, fokus dan lokasi peneleitian yang akan di teliti oleh peneliti.

G. Kerangka Konsenptual

1. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan desa di tujukan untuk segenap masyarakat ,dengan demikian pelaksanaanya menjadi tanggung jawab pemerintahan dan masyarakat desa. Pembangunan desa bunkalah terfokus dalam suatu bidang saja , akan tetapi harus seinmbang , serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa menyusun rencana pembangunan berdasarkan rencana Pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya rencana desa dan menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan peran serta masyarakat desa melalui badan rerencanaan pembangunan desa. Badan perencanaan pembangunan

desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, kebutuhan swadaya masyarakat desa dan/atau anggaran belanja pendapatan daerah kabupaten/kota berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44), istilah pembangunan belum menemukan kesatuan makna seperti modernisasi. Pembangunan secara umum diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mencapai pertumbuhan yang terencana dan disengaja serta perubahan suatu negara atau bangsa menuju modernisasi. Pembangunan ini juga bertujuan untuk mengubah paradigma dan pola pikir masyarakat dari tradisional menjadi modern. Baginya, makna sentral pembangunan adalah proses yang harus dilalui suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Infrastruktur desa juga memiliki peranan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Dengan adanya akses yang memadai terhadap pasar, produksi pertanian dan kerajinan lokal dapat dikembangkan dengan lebih efektif. Infrastruktur desa yang terintegrasi juga mendorong pertumbuhan pariwisata desa, meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan sektor ekonomi terkait seperti penginapan, restoran, dan usaha kreatif lokal.

2. Peran pemerintah desa

Peran pemerintah desa dalam upaya pembangunan infrastruktur merupakan hal utama dalam menunjang segala aktivitas yang dibutuhkan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur berupa infrastruktur jalan yang memadai, Infrastruktur listrik dan juga infrastruktur air bersih.

Pemerintah desa juga berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan.

Peran pemerintah desa adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Adapun peran pemerintah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pembinaan dan pendanaan/permodalan.

2. Peran pemerintah desa sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

3. Peran pemerintah desa sebagai kasilitator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.(Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik ISSN . 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015)

3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124), partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan, penggunaan, dan perolehan manfaat dari hasil pembangunan. Konsep ini mulai diperkenalkan oleh pemerintah pada awal tahun 1980-an dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan serta merawat lingkungan di sekitar mereka. Untuk mendukung gerakan

pemberdayaan masyarakat, pemerintah mendirikan berbagai lembaga seperti PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah yang mendorong partisipasi komunitas lokal dan memperkuat solidaritas. Perlu dicatat bahwa pemberdayaan masyarakat umumnya melibatkan staf pemerintah atau pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai penghubung antara kebijakan pembangunan dan apa yang perlu dilakukan oleh komunitas.

Melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, berbagai manfaat dapat dihasilkan. Pertama, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperkuat dukungan mereka terhadap rencana pembangunan.

4. Kesejahteraan masyarakat desa

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan sosial yang memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial. Masyarakat yang sejahtera memiliki ciri-ciri: Tidak miskin, Tidak menderita kelaparan, Memiliki akses pendidikan, Mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, Memiliki akses fasilitas kesehatan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan beberapa langkah, seperti :

1. Mengembangkan potensi ekonomi local
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Memperkuat pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat
4. Melestarikan lingkungan hidup
5. Memperkuat infrastruktur
6. Mendorong pembangunan ekonomi

H. Ruang Lingkup

Untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian ini dan agar lebih fokus serta berjalan lancar, maka sangat penting untuk menetapkan suatu batasan masalah. Ruang lingkup isu yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

Membangun kalurahan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga kalurahan widodomartani:

1. Peran pemerintah kalurahan widodomartani dalam pembangunan infrastruktur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat kalurahan.
2. Partisipasi masyarakat kalurahan dalam membantu pemerintah kalurahan widodomartani.
3. Kesejahteraan masyarakat desa.

I. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek dalam keadaan alami dan peneliti berperan sebagai alat utama, dengan fokus hasil penelitian pada pemahaman makna yang dikaji daripada mencakup generalisasi objek penelitian (Sugiyono, 2007).

Pendekatan penelitian kualitatif memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap situasi lapangan, serta memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan pola atau nilai, serta data yang muncul di lapangan (Moleong, 2002: 5). Untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, interpretasi langsung dari peristiwa atau kejadian menjadi hal yang sangat diutamakan dalam penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini bukan hanya untuk melakukan verifikasi, tetapi juga untuk mengembangkan pemahaman berdasarkan fakta yang terkumpul (falsifikasi). Oleh karena itu, penelitian kualitatif menghasilkan informasi deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati.

Agar fenomena sosial dapat dijelaskan dengan jelas dan tepat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berifat deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan kondisi subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang terlihat. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif biasanya menggunakan analisis data kualitatif

dengan pendekatan yang bersifat induktif. Penggunaan teori-teori yang relevan sebagai alat analisis data kualitatif menghasilkan deskripsi yang bermakna dan mendalam (Tim Penyusun, 2011: 25).

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah elemen spesifik yang dihitung sebagai subjek dalam suatu studi. Dalam pengertian lain, unit analisis dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Para peneliti sering kali masih kesulitan dalam membedakan antara objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Unit analisis dalam sebuah penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, objek, lokasi, atau rentang waktu tertentu, bergantung pada fokus dari penelitian tersebut. Adapun unit analisis dalam studi ini adalah :

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti mendapatkan data atau informasi melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada skripsi ini terletak di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah membangun Kalurahan untuk mewujudkan kemakmuran bagi warga Kalurahan Widodomartani ,kapanewon ngemplak ,kabupaten sleman ,Daerah istimewa Yogyakarta dalam hal ini

bagaimana suatu kalurahan /kalurahan agar bisa berkembang menjadikan tempat pertumbuhan ekonomi bagi warga masyarakat Kalurahan Widodomartani sendiri

c. Subjek penelitian

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari pemerintahan dan warga masyarakat kalurahan widodomartani, subyek penelitian ini terpilih karena saling berkaitan dengan obyek penelitian dan diharapkan dapat memberikan data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

Subyek adalah orang atau tokoh yang memberikan informasi atau data terkait “Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Kalurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Guna Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Desa. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan Teknik *purposive*, yaitu Teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai informan). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sama di kalurahan widodomartani, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan kalurahan Widodomartani
- 2) Tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kalurahan Widodomartani

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Pola pengumpulan data dapat dilakukan lewat proses wawancara, obserbasi, dokumentasi serta instrumen yang diperlukan dalam memperoleh data sehingga peneliti bisa mendapatkan data secara tepat, akurat dan ilmiah :

a. Observasi/Pengamatan

Menurut Widoyoko (2014:46) Observasi adalah kegiatan melihat dan mencatat dengan cara teratur terhadap elemen yang terlihat dalam suatu fenomena pada objek yang diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan serta pencatatan dengan cara teratur dan terencana pada objek penelitian tersebut. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan peneliti melakukan beberapa tahapan-tahapan adalah :

1. Menetapkan tempat/gejala dalam observasi penelitian.
2. Menetapkan gejala apa dalam observasi penelitian.
3. Memetakan observasi agar sesuai dengan fokus penelitian.
4. Membuat panduan pedoman wawancara observasi penelitian.
5. Menetapkan data-data observasi dari penelitian yang terdahulu maupun penelitian yang dilakukan secara langsung.
6. Mencatat hasil dari observasi penelitian

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018,140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. kemudian teknik wawancaranya dilakukan dengan sangat terstruktur yang dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan daftar pertanyaan atau lebih fleksibel, selain itu memberikan pertanyaan kepada informan seperti introgasi pertukaran informasi dengan subjek yang diteliti dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti harus memahami tahapantahapan wawancara berikut ini :

1. Menentukan terhadap siapa saja yang akan diwawancarai.
2. Merancang inti dari masalah yang akan di gali lebih mendalam.
3. Menyampaikan maksud dan tujuan dari wawancara yang akan dilakukan.
4. Menyampaikan intisari dari hasil wawancara dan menutup
5. Mencatat hasil wawancara .
6. Menandai tindak lanjut dari hasil wawancara yang di dapatkan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa dimasa lalu yang telah terjadi. Dokumentasi yang diperoleh berupa tulisan, gambar, serta

karya-karya ilmiah dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan penunjang dalam melakukan metode observasi wawancara dalam penelitian kualitatif. maka dari itu sumber-sumber dapat lebih dipercaya jika didukung dengan sejarah pribadi, kehidupan masa kecil, disekolah, tempat kerja, dimasyarakat, autobiografi (Sugiono 2017: 124-125). Dokumentasi dipilih sesuai dengan yang akan diangkat penulis yaitu tentang relasi pemerintah kalurahan, phiak swasta dan masyarakat.

4. Analisis data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008,246) analisis data meliputi :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah kegiatan dalam mengumpulkan data untuk kepentingan peneliti pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses untuk menonjolkan dan memilih elemen-elemen utama, serta memperhatikan hal-hal yang penting, sambil mencari pola dan tema. Dengan cara ini, data yang sudah dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih terang, dan akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya jika diperlukan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan pengambilan keputusan. Dengan analisis data

dalam cara ini, peneliti dapat lebih mudah memahami situasi yang ada, sehingga dapat merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

d. Verifikasi Data

Merupakan tahap akhir dalam pengambilan kesimpulan atau verifikasi melalui hasil penelitian yang akan menjawab fokus penelitian dari semula belum jelas menjadi lebih jelas.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WIDODOMARTANI

A. Sejarah Kalurahan Widodomartani

Sejarah kalurahan widodomartani dimulai dari dua kata, yaitu widodo yang berarti baik atau selamat, dan martani yang berhubungan dengan pertanian. Jika digabungkan, makna keseluruhannya adalah wilayah yang ideal untuk bertani. Pembentukan kalurahan widodomartani ini terjadi berdasarkan keputusan Sri Sultan HB IX pada tahun 1946, dan pada tahun 1951, kalurahan widodomartani mulai resmi dibentuk dengan menyatukan tiga kalurahan, yaitu kalurahan jeruksari, kalurahan dukuhsari, dan kalurahan kentisari.

Di tahun 2020, pemerintah kalurahan widodomartani bersama badan permusyawaratan kalurahan telah mengeluarkan peraturan kalurahan nomor 1 tahun 2020 yang menetapkan 19 april sebagai hari jadi kalurahan widodomartani. Oleh karena itu, setiap tahun tanggal tersebut akan dirayakan sebagai hari ulang tahun kalurahan widodomartani. Pada saat pembentukan kalurahan widodomartani, perangkat yang ada hanya terdiri dari:

- a. Lurah : kepala wilayah
- b. Carik : sekretaris desa
- c. Modin : urusan agama
- d. Kesejahteraan
- e. Keamanan

f. Sosial

Selanjutnya lurah yang pernah memimpin yaitu :

- a. Tahun 1951-1990 dipimpin oleh bapak purwo widodo (39 tahun)
- b. Tahun 1990-1990 dipimpin oleh Bapak Suharjo (1 Tahun)
- c. Tahun 1991-1998 dipimpin oleh Bapak Lamjai (7 Tahun)
- d. Tahun 2001-2013 dipimpin oleh Bapak Tony Suryanto (12 Tahun)
- e. Tahun 2014- sekarang dipimpin oleh Bapak Heruyono,ST (8 Tahun)

Sehingga sejak awal berdirinya kalurahan widodomartani, kalurahan ini telah dipimpin oleh lima orang lurah. Dari sejarah kalurahan widodomartani yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa lurah yang paling lama menjabat adalah bapak purwo widodo selama 39 tahun. bapak purwo widodo mampu menjalani masa jabatannya selama 39 tahun karena pada waktu itu belum ada peraturan dari pemerintah pusat yang mengatur mengenai masa jabatan seorang lurah kalurahan. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, sekarang masa jabatan Kepala Kalurahan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Kalurahan (SOTK) terbaru saat ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang pedoman SOTK.

B. Keadaan Geografis

Kalurahan widodomartani merupakan sebuah kalurahan di kabupaten sleman yang terletak di kapanewon ngemplak. Kalurahan widodomartani luasnya sekitar 615 hektar. Jaraknya 100 meter dari kota kapanewon, pusat pemerintahan daerah widodomartani berjarak sekitar 15 kilometer dari ibu kota daerah sleman, pusat pemerintahan daerah kalurahan widodomartani terletak 20 kilometer dari ibu kota provinsi, dan jarak antar pemerintah daerah. Pusat widodomartani dan ibu kota pulau berjarak 650 km. kalurahan widodomartani letaknya berdekatan dengan kapanewon ngemplak. Batas wilayah kalurahan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian utara : berbatasan langsung dengan kalurahan wukirsari
- 2) Sebelah selatan : berbatasan langsung dengan kalurahan selomartani
- 3) Sebelah barat : berbatasan langsung dengan kalurahan umbulmartani
- 4) Sebelah timur : berbatasan langsung dengan kalurahan bimomartanis.

Lahan di wilayah kalurahan widodomartani ada dua jenis, yaitu dataran atau lahan basah dan lahan kering yang digunakan untuk kebun dan pemukiman. Dari kedua jenis lahan tersebut, sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam yang lain menanam singkong, kentang, sayur mayur, cabai, bawang merah, kunyit dan tanaman lainnya yang dijadikan bumbu dapur. Nah, lahan yang digunakan

untuk desa tersebut sangat luas karena jumlah penduduk kalurahan widodomartani sebanyak yaitu 10.792 jiwa

Gambar 2. 1 Peta wilayah Kalurahan Widodomartani



1. Pembagian wilayah

Pembagian administratif Kalurahan Widodomartani, Sleman, terdiri dari 19 padukuhan, 31 rukun warga, dan 73 rukun tetangga.

Tabel berikut menunjukkan daftar 19 padukuhan dan jumlah RT dan RW. Gambar berikut menunjukkan pembagian wilayah administratif.:

Tabel 2. 1 Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kalurahan Widodomartani

No	Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW	Nama Dukuh
1	Banglen	3	1	Sumadiyono
2	Blambangan	4	2	Suryanto
3	Kalijeruk 1	3	1	Drs Yuniawan eko putro
4	Kalijeruk 2	3	1	Tri handoko
5	Ganjuran	2	1	Deni dwi harjanto
6	Klancingan	2	1	Wahadi
7	Jimat	2	1	Trihartono
8	Jangkang	2	1	Saryadi

9	Dalem	4	2	Kismadi
10	Jetis	6	2	Haryono
11	Kabunan	4	2	Kulup jaka umbaran
12	Kemasan	4	2	Lingga gupita
13	Karang	4	2	Suharsono
14	Ngalian	4	2	Sri yulianti
15	Kwadungan	4	2	Nanang sujatmiko
16	Karanganyar	2	1	Joko wiratno SH,MH
17	Pucangan	8	3	Amanda pungky
18	Pondok 1	5	2	Priangga arda priguna
19	Pondok 2	7	2	Suhamto
	Jumlah	73	31	

(Sumber Website Walurahan Widodomartani , 2024)

C. Keadaan Demografis

Pada tahun 2024, kalurahan widodomartani memiliki 10.792 penduduk, terdiri dari 5.420 laki-laki dan 5.372 perempuan, yang terbagi dalam 3.665 kepala keluarga (KK). Penduduk ini tersebar di 19 Dusun, 73 rukun tetangga, dan 31 rukun warga.

Dilihat dari Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin, Penduduk Kalurahan Widodomartani didominasi oleh laki-laki

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok umur dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Kelompok umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah orang/jiwa
1	Dibawa 1 tahun	15	6	21
2	2 s/d 4 tahun	113	85	198
3	5 s/d 9 tahun	343	303	646
4	10 s/d 14 tahun	403	351	755
5	15 s/d 19 tahun	380	349	730
6	20 s/d 24 tahun	371	379	753
7	25 s/d 29 tahun	366	357	727
8	30 s/d 34 tahun	360	345	711
9	35 s/d 39 tahun	335	346	683
10	40 s/d 44 tahun	410	402	815
11	45 s/d 49 tahun	406	396	804
12	50 s/d 54 tahun	365	368	734
13	55 s/d 59 tahun	374	363	738
14	60 s/d 64 tahun	250	272	522
15	65 s/d 69 tahun	222	252	476
16	70 s/d 74 tahun	190	214	407
17	Di atas 75 tahun	517	584	1104
	Total	5420	5372	10.792

(Sumber website kalurahan widodomartani,2024)

2. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan, berikut agama yang dianut oleh warga kalurahan widodomartani dan jumlah penganutnya yaitu

Tabel 2. 3 Tabel Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	10502
2	Kristen	86
3	Katholik	202
4	Hindu	0
5	Budha	1
6	Khonghucu	0
7	Kepercayaan terhadap YME/lainnya	1
	Total	10.792

(Sumber website Kalurahan Widodomartani tahun 2024

Dapat dilihat data diatas menunjukan bahwa penduduk di kalurahan widodomartani mayoritas beragama islam dengan jumlah penduduk 10.502 jiwa.

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia untuk hidup dengan layak. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Proses pembangunan kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data masyarakat kalurahan widodomartani berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang/jiwa
1	Belum atau tidak sekolah	8700
2	Belum tamat SD	585
3	Sedang TK/kelompok bermain	130
4	Tamat SLTP	317
5	Tamat SLTA	327
6	Diploma I/II	0
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	7
8	Diploma IV/Strata I	188
9	Strata II	0
10	Strata III	0
	TOTAL	10.254

(sumber website kalurahan widodomartani , 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kalurahan widodomartani masih sangat rendah, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang tidak memiliki pendidikan formal dan jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah SD.

4. Jumlah Penduduk menurut pekerjaan

Mata pencaharian utama masyarakat di kalurahan widodomartani sebagian besar berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat selain sektor pertanian, peternakan juga masih memiliki peranan penting bagi masyarakat kalurahan widodomartani. Data penduduk kalurahan widodomartani berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah orang/jiwa
1	Belum atau tidak bekerja	1796
2	Pelajar/ mahasiswa	1739
3	Karyawan swasta	1603
4	Mengurus rumah tangga	1427
5	Petani /pekebun	1245
6	Wiraswasta	756
7	Buruh harian lepas	476
8	Guru	111
9	TNI/POLRI	138
10	Pegawai negeri sipil (PNS)	305
11	Perangkat Kalurahan	32
	Total	9.628

(sumber website kalurahan widodomartani ,2024)

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana keagamaan

Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana Keagamaan

No	Tempat ibadah	Jumlah
1	Masjid	22
2	Mushola	11
	Total	33

(sumber monografri dinding kalurahan widodomartani,2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana keagamaan di kalurahan widodomartani sebagian besar terdiri dari masjid dan mushola yang ditujukan untuk penduduk islam. Ini jelas sesuai dengan populasi penduduk di kalurahan widodomartani, yang sebagian besar beragama islam.

2. Sarana dan prasarana Pendidikan

Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung SD//Sederajat	4
2	Gedung SMP/Sederajat	1
3	Gedung SMA/sederajat	1
4	Taman bacaan	1
	Total	7

(Tabel di atas menunjukkan bahwa semua jenis fasilitas pendidikan di kalurahan widodomartani memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap. Sekolah dasar, SMP, dan SMA memiliki fasilitas yang lengkap, serta taman bacaan.sumber monografi dinding kalurahan widodomartani,2024)

3. Sarana dan prasarana kesehatan

Tabel 2. 8 Sarana dan Prasana Kesehatan

No	Sarana kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	21
2.	Puskesmas	1
3.	Rumah sakit	1
	Total	23

(sumber monografi dinding Kalurahan Widodomartani , 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di kalurahan widodomartani cukup lengkap dengan adanya RS. Dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, fasilitas tersebut tentunya dapat menangani kebutuhan masyarakat untuk perawatan medis yang mendesak. di satu sisi, sarana kesehatan tersedia, tetapi jika tidak ada tenaga kesehatan, sarana kesehatan pun tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik.

4. Sarana dan prasarana olahragah

1, lapangan sepak bola: 1

Olahraga adalah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, begitu juga dengan masyarakat kalurahan widodomartani. Namun ada sedikit fasilitas olahraga di kelurahan ini.

E. Struktur organisasi kalurahan widodomartani

Struktur organisasi pemerintah kalurahan: Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menetapkan bahwa pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan dalam adalah tiga

kelompok kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa, juga dikenal sebagai "pemerintahan kalurahan". Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional, pemerintahan desa ini mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan urusan masyarakat. Sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan adalah pembantu kepala desa. Sekretariat desa bertanggung jawab untuk membantu kepala desa dalam hal administrasi pemerintahan desa. Sekretariat terdiri dari tiga divisi: keuangan, perencanaan, dan tata usaha dan umum. Pelaksana teknis terdiri dari tiga (tiga) divisi: pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Pelaksana kewilayahan terdiri dari 19 kewilayahan yang dipimpin oleh 19 dukuh. Ini dapat dilihat dari struktur organisasi pemerintahan kelurahan, yang disusun sesuai dengan kebutuhan pegawai untuk melayani masyarakat. Mulai dari lurah yang bekerja sama dengan BPK untuk membangun pemerintahan kelurahan yang konsisten dan memberikan pelayanan masyarakat yang tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat kelurahan.

Menurut permendagri No. 18 Tahun 2018, lembaga kemasyarakatan desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah wadah

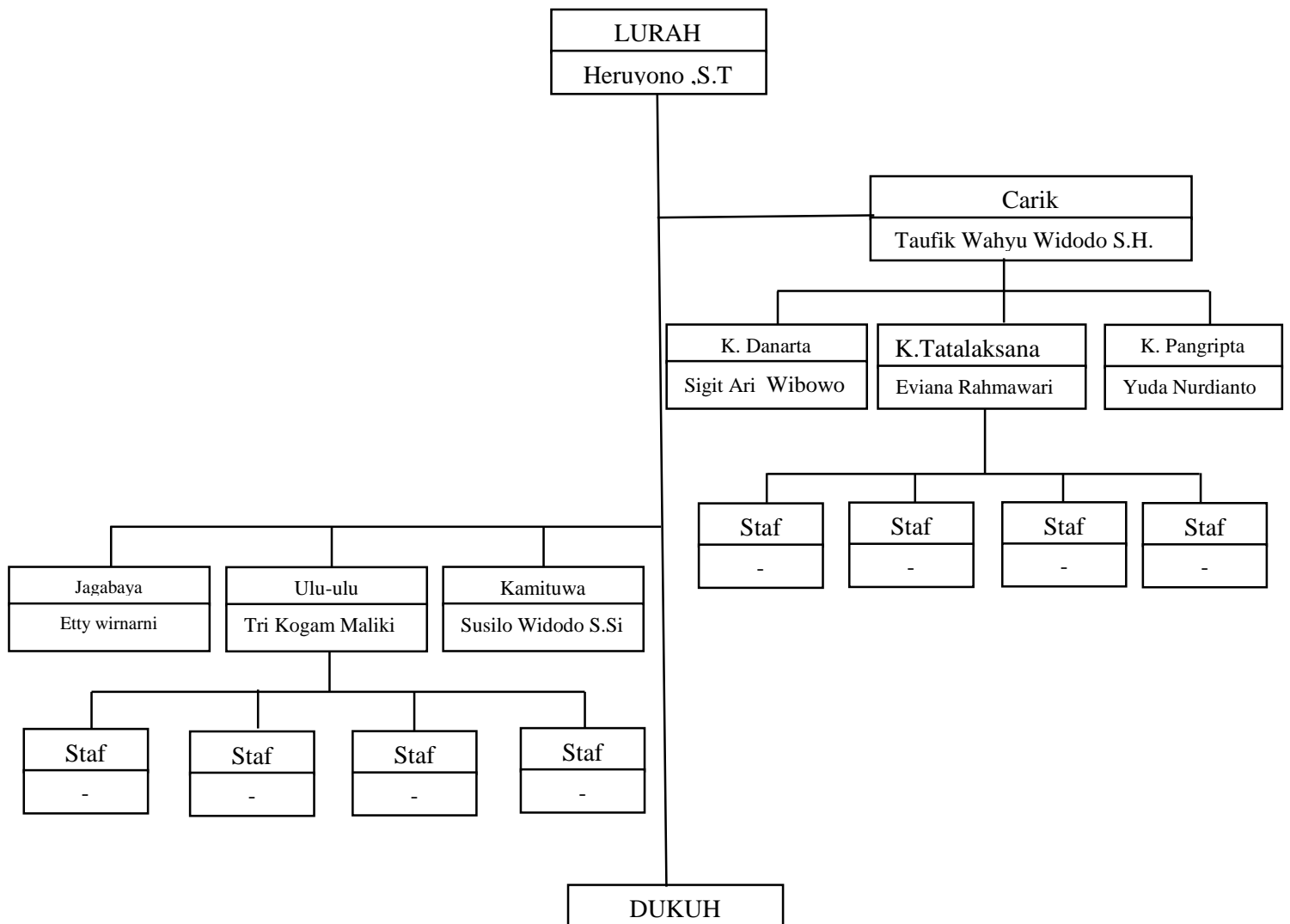
partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa. LKD juga bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) adalah lembaga demokrasi yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan. Tugas BPK adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menetapkan peraturan kalurahan bersama lurah. Anggota BPK adalah wakil dari penduduk kalurahan.

Bersangkutan dengan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui musyawarah dan persetujuan. Bagian penyelenggara pemerintahan kalurahan widodomartani adalah badan ermusyawaratan kalurahan, atau BPK, di widodomartani. Ini adalah wakil masyarakat kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat.

**Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Kalurahan Widodomartani,
Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman**

**STRUKTUR ORGANISASI KALURAHAN WIDODOMARTANI,
KAPANEWON NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN**



(Sumber monografi dinding Kalurahan Widodomartani tahun 2024)

Tabel 2. 9 Tabel Jabatan dan Tugas Pemerinah Kalurahan Widodomartani

No	Jabatan	Tugas
1	Lurah	Kepala / pemimpin kalurahan
2	Carik	Bertanggung jawab kepada lurah dan membawahi kepala urusan
3	Kaur danarta	Kepala urusan keuangan
4	Kaur tata laksana	Ketatausahaan dan pelayanan umum
5	Kaur pangripta	Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
6	Jaga baya	Urusan pelaksanaan teknis pembantu lurah bidang pemerintahan dan keamanan
7	Ulu-ulu	Urusan pelaksanaan teknis pembantu lurah yang di bidang pembangunan dan kemakmuran
8	Kamituwa	Bertugas melaksanakan kegiatan pemerintahan ,pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan didusun/padukuhan
9	Staf	Membantu melaksanakan tugas pemimpin kalurahan
10	Dukuh	Unsur pembantu kepala desa yang bertugas memimpin wilayah di tingkat dusu

BAB III

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT KALURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan banyak sumber daya, terutama sumber daya alam dan manusia. Karena itu, perencanaan pembangunan sangat penting bagi kelurahan yang tidak memiliki sumber daya yang memadai. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, paradigma pembangunan partisipatif diubah dan kelurahan diberi dana yang jumlahnya meningkat setiap tahun., oleh karena itu prioritas pembangunan infrastruktur pemerintahan kelurahan widodomartani sangat penting untuk peningkatan kapasitas infrastruktur masyarakat dimana peranan penting pemerintahan kelurahan widodomartani dalam membangun mutu peningkatan ekonomi kelurahan baik untuk kedepannya dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat kelurahan widodomartani .

Organisasi yang jelas sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat kelurahan yang bersangkutan. Pembangunan kelurahan yang terintegrasi, terpadu, dan terprogram memerlukan manajemen pemerintah yang baik untuk mencapai tujuan. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dikenal sebagai efektivitas pembangunan. Dukungan dan bantuan pemerintah dalam pembangunan kelurahan itu

sendiri sangat penting untuk efektivitas pembangunan tersebut. pada dasarnya, pembangunan adalah upaya terencana untuk meningkatkan kondisi seseorang ke kondisi yang dianggap lebih baik.

Sebagai informasi awal , kalurahan widodomartani merupakan salah satu kalurahan yang berada di kapanewon ngemplak, kabupaten sleman,daerah istimewa yogyakarta , pembangunan infrastruktur yang ada di kalurahan widodomartani ini mempunyai akses terbatas terhadap infrastruktur misalnya kalurahan sering mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Disini peran pemerintah sangat diperlukan dimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan sangatlah penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengatur regulasi, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Mereka juga harus memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat secara adil. Melalui peran ini, pemerintah dapat memastikan pembangunan yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat dan lingkungan .

Dalam langka menjawab pertanyaan ini, peneliti akan menggambarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemerintah kalurahan, badan permusyawaratan kalurahan dan pamong kalurahan, dan masyarakat kalurahan widodomartani. hasil observasi dan wawancara ini akan di analisis dengan menggunakan konsep Government (Pemerintah).

Yang telah digagaskan oleh Sutoro Eko. yang berkaitan dengan
Yenyelidiki struktur dan fungsi pemerintahan.

A. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Peran pemerintah desa merupakan hal penting dalam upaya pembangunan infrastruktur desa, kerja pemerintah desa bisa berjalan dengan baik apabila kinerja pemerintahnya sangat baik dan tentunya melibatkan masyarakat desa, sehingga dalam hal ini agenda penyusunan RKP kalurahan melibatkan seluruh anggota pemerintah kalurahan maupun masyarakat kalurahan widodomartani .

Peran pemerintah desa adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Adapun peran pemerintah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pembinaan dan pendanaan/permodalan.

2. Peran pemerintah desa sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan

dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

3. Peran pemerintah desa sebagai kasilitator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.(Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik ISSN . 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) merupakan salah satu bagian dari tatanan pembangunan kalurahan yaitu tatanan perencanaan. Sementara itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan kalurahan di lakukan melalui langkah pertama dalam kegiatan yang meliputi penyusunan perencanaan kalurahan melalui musyawarah kalurahan. Oleh karena itu, penting untuk mengarahkan perhatian pada musyawarah kalurahan. .

Pemerintah kalurahan widodomartani telah berupaya dalam pembangunan infrastruktur kalurahan melalui. Tupoksi kelembagaan dapat berubah, tetapi kegiatan harus melibatkan masyarakat dan penerima manfaat atau sasaran. Lembaga kemasyarakatan kalurahan, pemerintah kalurahan, dan masyarakat akan bertanggung jawab atas kegiatan yang

berkaitan dengan sarana umum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama, budaya, dan keamanan.

Target pencapaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulikan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada, namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh kalurahan.

Berkaitan dengan hal ini, Bapak Heruyono, lurah kalurahan widodomartani mengatakan bahwa :

“Jadi pada dasarnya pemerintah kalurahan widodomartani melakukan pembangunan yang haknya bagian dari kalurahan widodomartani, dimana pembangunan itu seperti ada jalan raya, irigasi ,bendungan ,dan adapun jalan usaha tani. Memang itu hak pembangunanya dari pemerintah kalurahan. Berawal dari permintaan masyarakat mungkin masyarakat didalam padukuhan sudah mengidefikasi apa apa yang harus dibangun dimana mereka melakukan lewat musyawarah padukuhan dan dibawa ke musyawarah kalurahan (MUSDES) kemudian kita mengidentifikasi permintaan yang sekiranya menjadi urjenitas, jadi kita pilih yang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk kedepanya. Jadi memang peran pemerintah kalurahan didalam pembangunan infrastruktur itu sangat penting karna nanti penganalisaan dan penentuan menjadi skala prioritas pembanguna infrastruktur kalurahan widodomartani.” (Wawancara 2 Agustus 2024)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah kalurahan widodomartani telah berupaya melakukan interaksi antar pemerintah dan masyarakat dengan cara musyawarah kalurahan (MUSDES) termasuk memberikan kesempatan bagi masyarakat kalurahan dalam menentukan apa saja pembangunan kalurahan yang selaknya di bangun dan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur kalurahan,

sehingga pemerintah kalurahan menetapkan program-program yang sudah ditetapkan tersebut akan di muat dan disetujui oleh BPKal.

Demikian juga yang dikatakan oleh bapak dukuh dalem pak kismadi sebagai berikut:

“Dari Pemerintah kalurahan sendiri telah memfasilitasi dengan dana kalurahan adapun sebagian pembangunan fasilitas itu seperti gapura, irigasi dan beberapa jalan untuk menuju lahan pertanian masyarakat. Adapun fasilitas pembangunan infrastruktur kalurahan yang dibangun oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) walupun nanti diminta pengawasan oleh pemerintah kalurahan terkait dengan dana yang diberikan . kami sendiri dari seluruh masyarakat padukuhan tentunya melakukan musyawarah padukuhan untuk meninjau apa yang harus dibutuhkan masyarakat untuk memfasilitasi kebutuhan kami dalam pembangunan yang di minta , setelah itu kami menghimbau kepada pemerintah kalurahan agar membangun apa yang sudah di butuhkan masyarakat.”
(Wawancara 2 Agustus 2024)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa pemerintah kalurahan sendiri telah memfasilitasi dana kebutuhan untuk melakukan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat padukuhan , terkait dengan itu juga dengan adanya bantuan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dapat menambah dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah kalurahan sendiri sehingga dapat di tuangkan dalam musyawarah kalurahan dan di BPKal sehingga dapat membantu pemerintah kalurahan dalam upaya menambah pembangunan infrastruktur kalurahan .

Demikian juga yang disampaikan oleh ibu Kalpikaningsih ketua BPKal Widodomartani bahwa :

“Kita sudah melaksanakan dan melakukan kodinator masing-masing kegiatan yang akan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun kami sendiri tentunya harus

melibatkan masyarakat kalurahan widodomartani dan tentu khususnya untuk penerima atau sasaran pembangunan. kemudian nanti untuk kegiatan sarana dan prasarana umum, kesehatan ,Pendidikan ,ekonomi ,budaya ,agama dan fasilitas umum lainnya akan dikelola oleh lembaga kemasyarakatan kalurahan, pemerintah kalurahan dan masyarakat.” (Wawancara 2 Agustus 2024)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa BPKal widodomartani telah melaksanakan kordinator di masing-masing lembaganya yang dimana kegiatan pembanguna telah di konfirmasih kemudian akan tuangkan di BPKal , keterlibatan masyarakat tentunya menjadi hal penting yang tentunya masyarakat diberi akses untuk dengan menentukan apa saja yang harusnya dibutuhkan oleh masyarakat, Hal ini berarti bahwa pemerintah kalurahan dan BPKal mempunyai komitmen yang kuat untuk pembangunan kalurahan dengan memberikan akses kepada masyarakat kalurahan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kalurahan .

Sementara itu Bapak Taufiq Wahyu Widodo Carik Kalurahan widodomartani mengatakan bahwa :

“Kalau khusus pembangunan infrastruktur , kami kalau sebelum ke musyawarah kalurahan biasanya diawali lagi dengan penjaringan aspirasi di tingkat padukuhan. dari padukuhan-padukuhan ini ketika usulan nanti dibawa ke tingkat kalurahan oleh dalam rapat kordinator. kemudian dari tim kalurahan sendiri mendampingi proses musyawarah di tingkat padukuhan itu, kemudian nanti dibawa oleh dukuh di tingkat kalurahan.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa musyawarah di kalurahan widodomartani dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah padukuhan hingga musyawarah kalurahan. musyawarah padukuhan sendiri bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat di

tingkat padukuhan, Dalam musyawarah padukuhan masyarakat termasuk membantu evaluasi terhadap kerja pemerintah kalurahan, sama seperti musyawarah kalurahan, musyawarah padukuhan juga melibatkan berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di padukuhan .

Hal ini juga di konfirmasikan oleh Bapak Suharsono sebagai tokoh masyarakat kalurahan widodomartani mengatakan bahwa :

“Dari kami melihat peran pemerintah Kalurahan terkait pembangunan infrastruktur kalurahan dalam hal tersebut dengan mendukung penuh program pemerintahan kalurahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan widodomartani lebih baik lagi” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah kalurahan telah melakukan kegiatan atau program-program yang telah di ingin oleh masyarakat kalurahan widodomartani dengan baik dan di dukung penuh oleh masyarakat. pemerintah kalurahan juga bertujuan untuk menciptakan konsesus (kesepahaman) antar pihak yang terlibat dan ikut serta dalam pembangunan infrastruktur kalurahan widodomartani .

Hasil wawancara Bersama bapak lurah Heruyono Kalurahan Widodomartani mengatakan bahwa :

“Dari kami sendiri pemerintah Kalurahan dengan adanya anggaran dana Kalurahan , alokasi dana Kalurahan , dan bantuan keuangan khusus adapun sumber dana yang lainnya mampu membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur yang akan di bangun tentunya , nah kemudiah nanti pembangunan yang sudah di tentukan disetiap padukuhan-padukuhan, tentunya masyarakat juga terbiasa dengan nilai-nilai pembangunan mandiri dalam pembangunan wilayah masing-masing.” (Wawancara 10 Agustus 2024)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa fungsi dana Kalurahan dalam pembangunan infrastruktur kalurahan masyarakat tentunya sudah memahami skala prioritas dengan cara bersosialisasi oleh padukuhan masyarakat yang bisa menerimanya . pendekatan dengan masyarakat harus dengan bersosialisasi dengan baik maupun lewat padukuhan atau kelembagaan dan juga regulasi program penggunaan dana Kalurahan yang semakin baik dan masyarakat menerima pembangunan tersebut atau kebijakan pemerintah kalurahan widodomartani dalam menghadapi pengelolaan dana kalurahan dan sistem regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. strategi yang dilakukan kalurahan widodomartani dalam peraturan program kalurahan yang mana berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan dari pemerintah kabupaten/kota dari kalurahan tersebut . Program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan saluran irigasi , kegiatan pembangunan jembatan , pembangunan jalan tani dan lain-lain .

Dari hasil wawancara dengan Bapak Irvan Adnan selaku sekretaris BPKla widodomartani mengatakan bahwa :

“Jadi begini mas, masyarakat dalam padukuhan sudah melakukan musyawarah yang kemudian nanti menyimpulkan prioritas-prioritas yang diusulkan ke kalurahan berdasarkan prioritas program satu dan kedua yang sebagaimana bidang pembangunan atau bidang masyarakat. tidak hanya diprioritaskan tetapi kebutuhan yang diinginkan Kalurahan juga. (Wawancara 10 Agustus 2024)

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pembangunan kalurahan yang lebih optimal , pemerintah Kalurahan dan

lembaga kalurahan widodomartani harus mampu melakukan pekerjaan yang sama dan dapat menyingkronkan dari hasil kerja masing-masing . agar pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan widodomartani dapat memperoleh kinerja yang bagus. pemerintah kalurahan dan lembaga kemasyarakatan kalurahan menyetujui pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur kalurahan yang sesuai dengan tujuan yang telah direcanakan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sarbini selaku wakil ketua BPKal widodomartani mengatakan bahwa :

“Jadi begini ya dalam proses pemnangunan infrastruktur Kalurahan tentunya pengelolaan dana Kalurahan dapat melakukan perencanaan musyawarah kalurhan dan padukuhan serta dusun , dan ada beberapa perencanaan usulan tim yang seleksi skala prioritas yang keinginannya bukan melainkan kebutuhan masyrakat tetapi untuk pengelolaan secara fisik yang tentunya saja tim pengelola kegiatan itu juga dari unsur-unsur masyarakat untuk kelembagaan yang disampaikan dengan transparasi untuk mengawasi oleh Badan Perwakilam Kalurahan atau masyarakat terbuka dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kalurahan yang melibatkan masyarakat itu sendiri.”
(Wawancara 13 Agustus 2024)

Dari pernyataan diatas dikatakan bahwa secara luas kebijakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur Kalurahan, pengawasan terhadap penggunaan dana Kalurahan untuk melakukan pembangunan juga tetap harus berjalan yang mana pengawasan tersebut langsung diawasi oleh Badan Permusyawaratan kalurahan (BPD) dan juga masyarakat kalurahan Widodomartani agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana kalurahan. oleh karena itu dalam hal institusi pemerintah mempunyai

unsur kapasitas politik sehingga kekuasaan dalam mengawal kebijakan dalam bidang pembangunan harus berjalan dengan baik.

Kemudian juga yang dikatan oleh bapak Susilo Widodo selaku kasi kamituwa kalurahan widodomartani mengatakan bahwa :

“Oh iya mas kalo dulu itu namanya musrembangdes sekarang musrembangkal menskalakan prioritas-prioritas yang dari padukuhan tadi menjadi skala prioritas Kalurahan. kemudian nanti kita carikan dana atau biaya dana Kalurahan atau dana PAD maupun dana yang lainnya. Kita usahakan cari itu kalua sudah ada sebagian skala prioritas kita danai.” (Wawancara 15 Agustus 2024)
Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah

kalurahan widodomartani sebelum mengambil langkah untuk menetapkan pembangunan infrastruktur apa yang dilakukan , pemerintah kalurahan terlebih dahulu melakukan musrembangkal sebagai strategi untuk mendiskusikan atau rembug bersama warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi kalurahan agar teridentifikasi dengan baik untuk memberih arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah kalurahan.

B. Partisipasi Masyarakat Kalurahan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uangtunai, dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka panjang. Keterlibatan berbagai pihak dalam hal ini adalah masyarakat luas yang merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan Kalurahan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Kalurahan .

Dari hasil wawancara dengan Bapak Priangga Arda Priguna selaku dukuh di padukuhan pondok 1 mengatakan bahwa :

“Begini mas, kita melaksanakan MUSDUS atau MUSRENBANGDUS dengan melibatkan RT/RW PKK ,karang taruna, LPMP masing-masing mengusulkan programnya kemudian dirembug setelah itu dibawa tingkat Kalurahan, dalam MUSREMBANGDUS tersebut dihadiri juga dari Kalurahan kasi Kalurahan (Kepala Urusan Perencanaan).” (Wawancara 20 Agustus 2024)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa kalurahan widodomartani menjadikan forum musyawarah kalurahan sebagai agenda untuk saling memberi masukan ,berdiskusi , bahkan memberikan kritik terkait berbagai berbagai program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan widodomartaani. pemerintah kalurahan widodomartani juga memberikan peluang dan ruang kepada masyarakat kalurahan untuk

menyampaikan pendapat dengan bebas dan tanpa tekanan. jadi musyawarah kalurahan juga di jadikan ajang untuk mengevaluasi dan menilai berbagai agenda pembangunan yang sudah dan akan dijalankan oleh pemerintah kalurahan widodomartani .

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Agus Suseno selaku staf anggota BPKal widodomartani mengatakan bahwa :

“Begini mas, pada saat penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, masyarakat kalurahan ikut adil baik itu dalam kegiatan, mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi . masyarakat Kalurahan juga terlibat dalam mengontrol musyawarah pembangunan Kaluraha. dalam hasil musyawarah tersebut masyarakat juga mengontrol hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan.” (Wawancara 20 Agustus 2024)

Berdasarkan pendapat diatas menunjukan bahwa masyarakat kalurahan sudah terllibat dalam mengontrol penyelenggaraan musyawarah perencanaan kalurahan . hal ini dilihat dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan sampai ke tahap evaluasi . pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukan adanya kepedulian terhadap keseluruhan usulan program pembangunan kalurahan yang akan di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan .

Sementara itu mas Nugroho Yulianto sebagai masyarakat kalurahan widodomartani mengatakan bahwa :

“Ya memang, kami setiap penyusunan RKP Kalurahan kami selalu di undang dan terlibat memberikan usulan -usulan kami . namun tidak semua kami terlibat , Cuma perwakilan yang bisa di andalkan dalam kegiatan tersebut . dan kami selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan apapun itu yang diselenggarakan Kalurahan dan kami selalu mengusulkan program yang akan kami rencanakan.” (Wawancara 25 Agustus 2024)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat kalurahan selalu di undang untuk terlibat dan ikut serta dalam musyawarah kalurahan. mereka diundang untuk menyampaikan usulan dan aspirasi mewakili seluruh suara masyarakat kalurahan. hal ini terjadi karena mereka hanya mengutus orang yang kompeten , kompeten yang dimaksud adalah bisa menyampaikan aspirasi di depan umum , adapun orang kompeten yang dimaksud adalah bapak dukuh /RT .

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Muslih wuri Kurniawan sebagai dukuh pondok 2 mengatakan bahwa:

“Iya mas, saya sebagai perwakilan masyarakat padukuhan juga selaku perwakilan masyarakat Kalurahan dalam tim penyusun mengawasi kegiatan pembentukan tim penyusun untuk perwakilan masyarakat harus ada “(Wawancara 25 Agustus 2024)

Berdasarkan yang disampaikan diatas dijelaskan bahwa keterwakilan masyarakat perlu adanya dalam tim penyusunan RKP guna untuk mengawasi pelaksanaan penyusunan RKP kalurahan, selain itu tugas untuk mengontrol kebijakan pemerintah kalurahan widodomartani secara khusu diserahkan kepada masyarakat yang menjadi anggota tim penyusun RKP kalurahan. mereka bertugas untuk memastikan semua usulan yang sudah tertuang dalam dokumen RKP kalurahan direalisasikan oleh pemerintah kalurahan widodomartani .

Sementara itu bapak muhamad yusuf sebagai warga masyarakat kalurahan widodomartani mengatakan bahwa :

“Yang saya lihat mas meraka sudah cukup aktif dalam Mengemukakan pendapat meraka mengenai rencana pembangunan kalurahan, termasuk memberikan masukan agar program pembangunan Kalurahan ini juga mempertimbangkan kondisi Kalurahan . Seperti misalnya pembangunan fasilitas yang memang belum ada .” (Wawancara 25 Agustus 2024)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa partisipasi masyarakat kalurahan widodomartani dalam memberikan pendapat mengenai rencana pembangunan kalurahan tercermin dari adanya masyarakat yang memberikan usulan terhadap pembangunan yang harus di prioritaskan dan benar-benar dibutuhkan . selain itu masyarakat di masing-masing wilayah juga cukup aktif dalam memberikan saran dalam pembangunan dibidang kesehatan , pendidikan serta pembangunan irigasi lahan pertanian .

C. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah pilar utama pembangunan suatu negara. Kesejahteraan mereka sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanpa kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan di negara kita akan tidak seimbang. Indonesia adalah negara agraris dengan mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya berkaitan dengan mencukupi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga mencakup tingkat pendidikan, kesehatan, dan akses ke sumber daya alam.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan di pedesaan, memberikan bantuan finansial kepada masyarakat desa yang kurang mampu, menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di pedesaan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui pelatihan dan akses ke modal usaha.

Berkaitan dengan hal diatas bapak Heruyono selaku lurah menyampaikan bahwa:

“Jadi begini secara umum, masyarakat di kalurahan kami cukup berkembang meski masih banyak tantangan. Sebagian besar warganya bekerja di sektor pertanian sebagaimana pendapatan utama mereka sendiri yaitu dari hasil pertanian, tetapi ada juga yang membuka usaha kecil dan menengah (UKM).

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa kebutuhan pokok warga kalurahan widodomartani ada disektor pertanian tetapi pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok masih kurang kalo hanya dari sektor pertanian. Sehingga dari sebagian warga masyarakat kalurahan widodomartani membuka usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menambah kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Demikian juga yang disampaikan oleh bapak nugroho yulianto sebagai warga masyarakat kalurahan mengatakan bahwa:

“Oh iya mas untuk di desa kami ada beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), serta program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan. Kami juga berfokus pada peningkatan infrastruktur ,seperti pembangunan jalan desa dan fasilitas air bersih, yang langsung berdampak pada kualitas hidup warga.”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa untuk menunjang kesejahteraan warga masyarakat pemerintah kalurahan membuat berberapa program yang bisa membantu warga masyarakat. Dimana program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (PKH) serta program untuk pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan. Sehingga warga masyarakat mendapat pengetahuan dari hasil pelatihan itu, agar warga bisa membuka peluang usaha dari hasil pelatihan yang telah di buat.

Demikian juga yang disampaikan oleh bapak anton selaku warga kalurahan widodomartani menyampaikan :

“Kalau untuk kesejahteraan di desa kami, memang ada beberapa kemajuan, tapi juga masih ada yang perlu diperbaiki. Sejak beberapa tahun terakhir , ada program pemerintah yang membantu desa kami dalam hal infrastruktur, seperti jalan yang baik dan adanya bantuan langsung tunai. Namun, masalah utama kami ada dibidang pekerjaan dan pendapatan warga.”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di kalurahan widodomartani sudah membantu warga kalurahan dalam menunjang akses kegiatan sehari-hari warga, Namun beberapa pembangunan yang masih di perlukan oleh warga kalurhan belum terealisasi . dengan adanya bantuan dari pemerintahan juga bisa membantu atau meringankan kondisi tersebut . Dan masalah yang dihadapi warga sendiri ialah bagaimana mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap untuk kebutuhan mereka sendiri, dimana dikarnakan masih terbatas lapangan pekerjaan di kalurahan sehingga banyak warga ,pemuda yang terpaksa merantau ke kota untuk mencari pekerjaan .

Kemudian yang disampaikan oleh ibu Tini selaku warga kalurahan widododomartani mengatakan bahwa:

“Iya mas begini, kalo dari kami warga melihat akses pembangunan di kalurahan ini sudah cukup baik mas, kalo saya lihat di bidang kesehatan aksesnya sudah cukup baik karena adanya puskesmas yang selalu siap melayani . Tapi kadang-kadang, obat nya atau alat medisnya terbatas . kalo untuk pendidikan , saya rasa sudah cukup memadai, meskipun masih ada beberapa anak yang harus berjalan jauh untuk sekolah. Tetapi secara umum, kami merasa bangga dengan kemajuan pendidikanya disini, karna sekarang banyak anak yang bisa melanjutkan sekolahnya sampai tingkat SMA bahkan ke perguruan tinggi.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa akses penunjang kesejahteraan masyarakat desa juga dilihat dari aspek seperti pendidikan ,kesahat. Dimana pendidikan sangat penting untuk seluruh warga masyarakat desa, karna pentingnya pendidikan itu bisa merubah segala kondisi hidup manusia itu sendiri dan juga bisa menjadi modal untuk mencari pekerjaan. Demikian juga dengan akses kesehatan , masyarakat tentunya membutuhkan tempat untuk mereka berobat dikalah sakit , dengan adanya fasilitas seperti puskesmas bisa membantu masyarakat untuk berobat dan berbagai macam kegiatan kesehatan lain .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan hasil penelitian dibahas secara langsung dan dianalisis. Dalam bab ini, penyusun mencapai kesimpulan yang sesuai dengan penelitian tentang "Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Kalurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan" Di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta .

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah kalurahan mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di perkalurahan yang dilakukan melalui pesan pesan pembangunan infrastruktur, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dengan demikian peran pemerintah kalurahan hendaknya bertanggung jawab atas jalanya roda pemerintah dan pembangunan diwilayah kalurahan
2. Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kalurahan sangat berperan aktif untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur kalurahan , dimana hal ini dilihat dari penyampain suara dan aspirasi mereka sangat penting dalam mengambil adil setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan. sehingga program pembangunan infrastruktur yang sudah di sampaikan oleh masyarakat kalurahan

melalui musyawarah padukuhan dan musyawarah kalurahan dapat diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah kalurahan.

3. Kesejahteraan masyarakat kalurahan dapat terpenuhi apabila kebutuhan dasar dan hak-hak sosial individu dalam masyarakat terpenuhi dengan baik, serta adanya kesempatan yang adil untuk berkembang. Kesejahteraan ini melibatkan aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat kalurahan, ketersediaan dan akses pendidikan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu kemudian akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, serta keberadaan sistem ekonomi yang adil dan stabil.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan atas hasil kajian uraian di atas, maka dibagian akhir penyusun mencoba memberikan saran kepada semua pihak yang berkepentingan pada mengenai peran pemerintah kalurahan dan partisipasi masyarakat kalurahan dalam pembangunan infrastruktur guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kalurahan widodomartani .

1. Peran pemerintah kalurahan widodomartani perlu memberikan bantuan sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya pembangunan infrastruktur di kalurahan widodomartani
2. Partisipasi warga masyarakat kalurahan widodomartani perlu lebih mendukung (berpartisipasi) dalam pembangunan infrastruktur di kalurahan widodomartani dengan lebih antusias dan lebih partisipatif

dalam keterlibatan menjalankan pembangunan infrastruktur kalurahan demi terwujudnya kesejahteraan kemakmuran rakyat kalurahan widodomartani .

3. Kesejahteraan masyarakat kalurahan widodomartani perlu di tingkatkan lagi agar kestabilan perekonomian masyarakat kalurahan widodomartani bisa berjalan dengan baik. Tentunya dengan menerapkan pembangunan infrastruktur yang merata untuk seluruh warga kalurahan widodomartani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, Pembangunan PeKalurahan an dan Perkotaan, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Alim, Ibnu Thosin Hidayatul, Yusuf Hariyoko, and Anggraeny Puspaningtyas. 2022. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan." Seminar Nasional 2022 "Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi" 1 (1): 1689–
- Amantha, Goestyari Kurnia. 2021 "Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Kalurahan Way Urang merupakan salah satu Kalurahan di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran." https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=NV2W_qkAAAAJ&citation_for_view=NV2W_qkAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
- Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom s Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaiindo Media dan Offset.Offset.
- Fitrianti, A. A., Romadhan, A. A., & Salahudin. (2022). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PerKalurahan an: Kajian Pustaka Terstruktur. *Journal of Regional and Rural*
- Development Planning, 6(1), 47–64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64> Syarifudin, Aip, S and Muaz. A. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Kalurahan .. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 5: Hal 6 No 14.
- Fitrianti et al., (2022) *Jurnal Of Regional And Rural Developmet Planning Dalam Jurnal*, Volume 6, Tahun 2022 <https://ejcs.eastasouth-institute.com/index.php/ejcs/article/view/143>
- Jurnal Manejemen Dan Kebijakan Public*, Gema publica ,Vol.3,Hal,85-91,Desember 2018 Kebijakan Pembangunan Kalurahan Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Di Kalurahan Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro"
- Katili, Andi Yusuf. 2020. "Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Kalurahan (Gerbang Kalurahan) Melalui Program Infrastruktur." Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 3 (2): 95–102. <https://doi.org/10.37606/publik.v3i2.72>.

- (Pratama & Setiawan, 2022) Jurnal Administrasi Publik ,Volume 8, Tahun 2022 .
 Kapasitas pemerintah Kalurahan dalam menggerakkan Pembangunan
 infrastruktur Kalurahan makujung , kapanewon barito tuhup raya ,
 kabupaten murung raya kalteng” [https://e-
 journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/4134](https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/4134)
- Posumah, Ferdy. 2015. “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi
 Di Kabupaten Minahasa Tenggara.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisien 15 (2):
 1–13
- Peraturan menteri dalam negeri (Pemendagri No 18 Tahun 2018
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>
)
- Peraturan menteri dalam negeri (Pemendagri No 113 Tahun 2014
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Ramainim Saragih sarwititi Agung 2017 “ Peran Komunikasih Politik Pemerintah
 Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan
 Dana Kalurahan ”
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/698>
- Rahum, Abu. 2015. “Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Add) Dalam
 Pembangunan Fisik Kalurahan Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis
 Kabupaten Paser.” EJournal Ilmu Pemerintahan 3 (4): 1–14.
[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
 content/uploads/2015/11/eJournal \(11-05-15-10-50-31\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20(11-05-15-10-50-31).pdf).
- Sasmito, Cahyo. 2017. “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan
 Kalurahan .” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6,
 No. 3 (2017) IMPLEMENTASI 6 (3): 72. www.publikasi.unitri.ac.id.
- Siagian (2009:142-150) “Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
 masyarakat”
[https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://ejournal.ipdn.ac.id/JIP
 WP/article/download/1490/976&hl=id&sa=X&ei=boKWZt6lBZWx6rQP
 086HoAE&scisig=AFWwaeb6TUyqmigqcTfJuVblNrmi&oi=scholar](https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/download/1490/976&hl=id&sa=X&ei=boKWZt6lBZWx6rQP086HoAE&scisig=AFWwaeb6TUyqmigqcTfJuVblNrmi&oi=scholar).
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Dasa
[http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/577-evaluasi-penataan-
 kewenangan-Kalurahan menurut-undang-undang-no-6-tahun
 2014#:~:text=Berdasarkan%20Undang%20Undang%20Nomor%206, dan
 %20kewenangan%20lain%20yang%20ditugaskan. https://ejournal.fisip.
 unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/298](http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/577-evaluasi-penataan-kewenangan-Kalurahan-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014#:~:text=Berdasarkan%20Undang%20Undang%20Nomor%206,dan%20kewenangan%20lain%20yang%20ditugaskan.)

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA

1. a. Peran pemerintah Kalurahan dalam pembangunan infrastruktur

- Bagaimana peran pemerintah Kalurahan dalam pembangunan infrastruktur Kalurahan ?
- Di dalam pemerintahan Kalurahan siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contoh pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan atau yang lainnya?
- Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan Infrastruktur ?
- Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan infrastruktur ?

b. Pembangunan infrastruktur untuk kemakmuran rakyat

- Apakah tujuan dari pembangunan infrastruktur Kalurahan /Kalurahan ?
- Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.?
- Mengapa kegiatan pembangua infrastruktur Kalurahan /Kalurahan harus dilakukan ?
- Dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur apakah pernah mengalami kesulitan ?

- Bila terjadi kendala dalam proses pengelolaan pembangunan infrastruktur , apakah ada evaluasi ?

2. Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah Kalurahan

- Apakah semua masyarakat atau sebagian masyarakat ikut berperan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur ?
- Pada saat sebelum dilakukannya pembangunan infrastruktur apakah dilakukan musyawarah Kalurahan ?
- Apa saja bentuk kontribusi yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur ?
- Siapa yang mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ?
- Apa manfaat yang dirasakan masyarakat setelah program pembangunan infrastruktur selesai?
- Apakah perencanaan pembangunan infrastruktur Kalurahan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat?

DOKUMENTASI







**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI PEMBAHANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TWA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id


SURAT TUGAS

Nomor : 306/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Frenandemenz Realino Kamuson
Nomor Mahasiswa : 20520122
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak,
Kabupaten Sleman
b. Sasaran : Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan
Infrastruktur guna Mewujudkan Kemakmuran Rakyat
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 606/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

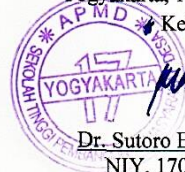
Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Frenandemenz Realino Kamuson
No Mhs : 20520122
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Infrastruktur guna Mewujudkan Kemakmuran Rakyat
Tempat : Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024



Ketua

[Signature]
Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON NGEMPLAK
LURAH WIDODOMARTANI

ꦭꦸꦫꦲꦮꦶꦢꦺꦴꦩꦂꦠꦤ꧀

Jalan Jangkang., Widodomartani, Ngemplak, Sleman, 55584
Telepon (0274) 4461469

SURAT KETERANGAN

NO : 070 / 85 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : HERUYONO, ST
Jabatan : Lurah Widodomartani

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Frenandemenz Realino Kamuson
No. MHS : 20520122
Jenjang : S1
Program Studi : Ilmu Pemerintahan di STPMD "APMD Yogyakarta.

Adalah benar Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan penelitian di Kalurahan Widodomartani guna menulis Skripsi dengan Judul " Peran Pemerintah kalurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Guna Mewujudkan kemakmuran Rakyat".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat , agar dipergunakan dengan semestinya.

Widodomartani, 4 Desember. 2024

Lurah Widodomartani



HERUYONO, ST.